

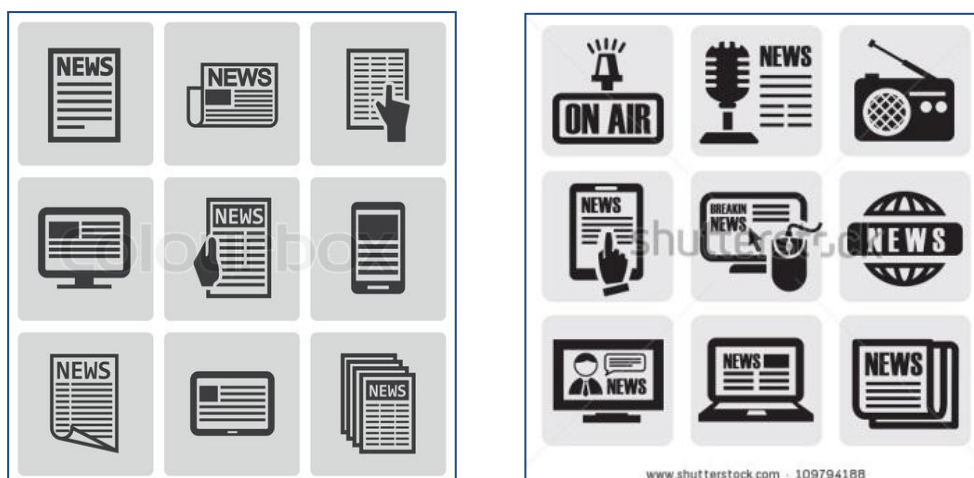


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Politik

Kamis, 25 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2014**

## **Daftar Isi**

1. GBHN HENDAK DIHIDUPKAN KEMBALI (*Media Online Media Indonesia*)
2. RPJMN PEMERINTAH BARU AKAN DIPUBLIKASIKAN NOVEMBER (*Media Online Indonesia Finance Today*)

## GBHN HENDAK DIHIDUPKAN KEMBALI



**MEDIA  
INDONESIA** 4  
JUJUR BERSUARA

Harian Umum  
Media Indonesia  
Midobcom  
Pemasangan Iklan &  
Customer Service: 021 502 1303  
No. Bebas Pulu: 0800180094  
e-mail: [cs@mediaindonesia.com](mailto:cs@mediaindonesia.com)

Kamis, 25 September 2014

Halaman 6, Kolom 3-6

### GBHN Hendak Dihidupkan Kembali

KETUA Fraksi Partai Demokrat di MPR RI Jafar Hafsah mengatakan Panitia Ad Hoc II yang dibentuk MPR periode 2009-2014 akan merekomendasikan pembentukan badan kajian MPR. Badan tersebut mulai bekerja untuk MPR periode mendatang dan akan mempersiapkan haluan negara.

"Dulu ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kita sekarang seperti tidak punya arah dan tujuan. Haluan negara ini jadi *guidance* Indonesia mau dibawa kemana," kata Jafar kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menambahkan, setiap calon presiden ketika akan mengikuti pemilu harus menyiapkan visi dan misi sesuai

haluan negara. "Haluan negara ini diberikan status dan porsi yang lebih besar untuk jadi acuan," imbuhnya.

Menurut Jafar, hasil kajian Panitia Ad Hoc (PAH) II bersifat mengikat dan harus dijalankan MPR periode berikutnya.

Saat diisnggung mengenai PAH I, ia mengatakan UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD), memberikan porsi lebih dalam membuat tata tertib.

"Diharapkan tata tertib yang dihasilkan PAH I bisa membuat MPR memiliki kewenangan lebih untuk menata sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk tata cara MPR mengamendemen UUD 1945 dan penguatan fungsi serta peran DPD.

MPR memang harus diperkuat sebagai penerapan dan implementasi Pancasila sebagai ideologi," tegas Jafar.

Jafar menambahkan, MPR perlu memantapkan sistem presidensial karena selama ini presiden kerap tersandera DPR yang berisi partai-partai politik dengan berbeda kepentingan. Demokrat mengusulkan penyederhanaan partai politik untuk memperkuat sistem presidensial.

"Presiden murni melaksanakan kerja, jangan terjebak dengan aroma parlementer. Presiden itu sebaiknya dilahirkan dari partai yang lebih sederhana," paparnya.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan pihaknya mendukung penguatan peran

MPR sesuai amanat UU MD3 agar MPR lebih terasa berperan bagi rakyat Indonesia.

"Kita masih banyak partai sehingga untuk mengukuhkan sistem presidensial sangat sulit. Misal saat presiden menunjuk pejabat negara, seperti duta besar, Kapolri, Jaksa Agung dan pejabat negara lainnya. Selama ini DPR terlalu banyak terlibat," kata Nasir.

Karena itu, sambung Nasir, badan kajian MPR mendatang harus bisa merumuskan perbaikan sistem ketatanegaraan demi Indonesia yang lebih baik.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan GBHN bukanlah alat penilaian bagi kinerja presiden. "GBHN juga bukan alat untuk pemakzulan presiden," ungkapnya. (Yah/Cah/P-6)

**Badan Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009-2014 akan merekomendasikan haluan negara**

Hashtag Berita :

#ArahKebijakanPembangunanNasional

#GBHN

#UUMD3

#MPR(MajelisPermusyawaratanRakyat)



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499



# INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Kamis, 25 September 2014

Halaman 6, Kolom 1-5

## RPJMN Pemerintah Baru akan Dipublikasikan November

*Jika melihat secara menyeluruh poin-poin perencanaan pembangunan yang ada dalam draft RPJMN Teknokratik yang disusun pemerintahan SBY untuk program-program pro rakyat hanya ada sedikit perbedaan.*

Dusep Malik

JAKARTA - Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan isi draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2015-2019 telah sesuai dengan visi misi presiden terpilih. Diharapkan RPJMN final dapat segera dibuka kepada publik pada November 2014.

Rini Soemarno, Kepala Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan dari draft RPJMN Teknokratik yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) banyak hal yang sudah sesuai dengan visi misi, hanya perlu sedikit tambahan untuk menyempurnakannya.

Bahkan, Rini mengakui jika melihat secara menyeluruh poin-poin perencanaan pembangunan yang ada dalam draft RPJMN teknokratik yang disusun pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk program-program pro rakyat hanya ada sedikit perbedaan.

"Jadi dari sisi Ibu Armida (Menteri/Kepala Bappenas) sudah disiapkan



Pemerintah baru akan mempublikasikan RPJMN pada November termasuk di dalamnya program pembangunan infrastruktur.

RPJMN teknokratik 2015-2019 dengan baik, kemudian kita akan detilkan dan dihubungkan dengan visi misi Jokowi-JK. Bahkan, sebetulnya setelah melihat semua, ini hanya penyesuaian saja sebab banyak hal yang sama dan sedikit perbedaan dari yang diinginkan," terangnya.

Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan RPJMN Teknokratik yang disiapkan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. RPJMN yang disiapkan adalah rencana pem-

angunan sesuai dengan isu yang menjadi perhatian pemerintah mendatang.

Untuk itu, dalam draft yang disampaikan pemerintah kepada tim transisi banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah baru untuk disesuaikan dengan visi misi dalam janji-janji kampanyenya. "Kami serahkan berbagai isu pembangunan dan kewenangan, berikutnya jadi tanggung jawab pemerintah baru," tegasnya.

Adapun isi RPJMN teknokratif 2015-2019 disusun untuk mem-

perkuat landasan ekonomi Indonesia dan keluar dari negara *middle income trap* (MIT) yang telah berlangsung selama 20 tahun. RPJMN menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sebesar 6% - 8% per tahun.

Selain itu, target pertumbuhan tersebut mendorong target pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi US\$ 7.000 pada 2019. Sementara target kemiskinan turun menjadi 6% - 8% pada periode 2015-2019 dari saat ini yang berada di kisaran 11%.

Sedangkan untuk menekan ketimpangan pendapatan di masyarakat RPJMN 2015-2019 menyebutkan perlu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di luar Jawa menjadi 45%-47% pada 2019 dari saat ini sebesar 41%, sementara PDRB Jawa turun menjadi 53%-55% pada 2019 dari saat ini sebesar 59%.

Draft tersebut juga menyebutkan untuk mencapai semua target, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan perbaikan pendidikan, terjaminnya swasembada pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas sarana infrastruktur, turunya kesenjangan, dan menekan praktek korupsi.

### Pekerjaan Rumah

Sementara itu, Josua Pardede, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah baru dan merupakan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pekerjaan rumah tersebut adalah perlunya melakukan reformasi anggaran yang menjamin kesinambungan fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan biaya logistik dan biaya produksi. Di samping itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mengurangi kesenjangan dengan cara mendorong pertumbuhan inklusif dan fokus terhadap sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Dalam visi misi Jokowi-JK disebutkan hingga 2019 ditargetkan dapat membangun jalan baru sepanjang 2.000 kilometer, membangun jalur kereta api di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain itu juga akan mengembangkan pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong sebagai hub pelabuhan internasional. Sementara di bidang perhubungan udara akan membangun bandara di 10 lokasi baru. ●

**Jika melihat secara menyeluruh poin-poin perencanaan pembangunan yang ada dalam draft RPJMN teknokratik yang disusun pemerintahan SBY untuk Program-program pro rakyat hanya ada sedikit perbedaan**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#RPJMN(RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional)

#RKP(RencanaKerjaPemerintah)